

Bab V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Kalimantan tengah), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 22% yang dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 19,7% yang dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 29,5% yang dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan 70,5% disebabkan oleh faktor-faktor lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan beberapa kelemahan yang ditemukan penulis terkait dengan pelaksanaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti masih kurangnya pemahaman Badan Pemeriksa Keuangan mengenai tugas dan tanggungjawabnya, maka untuk dapat meningkatkan Pengaruh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berikut ini penulis mengajukan beberapa saran, diantaranya:

1. Badan Pemeriksa Keuangan masih perlu untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan undang-undang No.14 tahun 2008 yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan membuka akses publik terhadap masyarakat diharapkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.
2. Badan Pemeriksa Keuangan masih perlu untuk meningkatkan akuntabilitasnya dengan mengetahui mengenai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pekerjaannya sehingga pengelolaan keuangan pemerintah terlaksana secara efektif yang dikomunikasikan melalui jaringan efektif dan memberikan pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sejenis, penulis menyarankan sebaiknya untuk menambahkan jumlah sampel yang banyak dan tidak terbatas pada beberapa kantor pemerintah daerah.